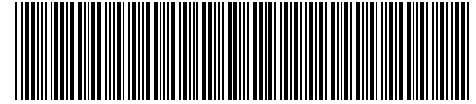




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.1.409288/2021**



DS:7638-6900-0885-5161

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- Sebesar : Rp. 49.454.443.000 ( EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	49.454.443.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 49.454.443.000

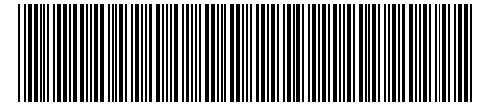
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021**

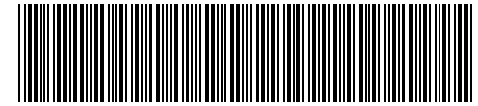


DS:7638-6900-0885-5161

Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	4.046.189.000
BB.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	2.168.390.000
BB.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	1.877.799.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	5.072.643.000
BF.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1.902.291.000
BF.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	3.170.352.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	40.335.611.000
WA.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	40.335.611.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			4.046.189.000
Kegiatan	:	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			2.168.390.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan			
		2. 02	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional			
		3. 03	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	201,00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.390.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	200,00	Rekomendasi Kebijakan	1.754.558.000
		02 ABD.002	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	413.832.000
Kegiatan	:	1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional			1.877.799.000
	:	1. 01	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda			
		2. 02	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang			
		3. 03	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	13,00	Rekomendasi Kebijakan	1.877.799.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Program Legislasi	3,00	Rekomendasi Kebijakan	835.858.000
		02 ABD.002	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	3,00	Rekomendasi Kebijakan	541.941.000
		03 ABD.003	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	7,00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			5.072.643.000
Kegiatan	:	1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional			1.902.291.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif			
		2. 02	Indeks kepuasan layanan perpustakaan			
		3. 03	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1610.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	163,00	Lembaga	1.550.134.000
Rincian Output		:	01 BDB.001	Fasilitas Integrasi JDIHN	163,00	Lembaga	1.550.134.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1610.BMA	Data dan Informasi Publik	3,00	layanan	352.157.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Layanan Perpustakaan Hukum	3,00	layanan	352.157.000
Kegiatan		:	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum			3.170.352.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		:	2. 02	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi			
		:	3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1612.ADE	Akreditasi Lembaga	524,00	Lembaga	1.121.860.000
Rincian Output		:	01 ADE.001	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 s.d. 2024	524,00	Lembaga	1.121.860.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1612.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	432,00	Orang	519.726.000
Rincian Output		:	01 ADG.001	Layanan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	432,00	Orang	519.726.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1612.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	380,00	Kelompok Masyarakat	1.328.743.000
Rincian Output		:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	315,00	Kelompok Masyarakat	1.020.355.000
		:	02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	65,00	Kelompok Masyarakat	308.388.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	6	:	1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	557,00	Lembaga	200.023.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	557,00	Lembaga	200.023.000
Program		:	013.10.WA	Program Dukungan Manajemen			40.335.611.000
Kegiatan		:	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			40.335.611.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1614.EAA	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	27.133.710.000
Rincian Output		:	01 EAA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	27.133.710.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1614.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2,00	Layanan	572.725.000
Rincian Output		:	01 EAB.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Layanan	215.000.000
		:	02 EAB.002	Manajemen Keuangan	1,00	Layanan	357.725.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1614.EAC	Layanan Umum	1,00	Layanan	328.600.000
Rincian Output		:	01 EAC.001	Layanan Umum	1,00	Layanan	328.600.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1614.EAD	Layanan Sarana Internal	197,00	unit	3.553.924.000
Rincian Output		:	01 EAD.951	Layanan Sarana Internal	197,00	unit	3.553.924.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1614.EAE	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	5.812.000.000
Rincian Output		:	01 EAE.951	Layanan Prasarana Internal	1,00	unit	5.812.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I A. 4

Layanan Prasarana Internal

unit

Klasifikasi Rincian Output	6	:	1614.EAF	Layanan SDM	232,00	orang	416.124.000
Rincian Output		:	01 EAF.001	Layanan SDM	232,00	orang	416.124.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	1614.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	841.349.000
Rincian Output		:	01 EAH.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	841.349.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	1614.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1,00	Layanan	1.293.255.000
Rincian Output		:	01 EAI.001	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1,00	Layanan	1.293.255.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	1614.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	281.548.000
Rincian Output		:	01 EAJ.001	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	281.548.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	1614.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00	Laporan	102.376.000
Rincian Output		:	01 EAL.001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00	Laporan	102.376.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021**  
**I B. SUMBER DANA**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	49.454.443.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	49.454.443.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>409288</b>	<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>	<b>16.822.442</b>	<b>23.216.077</b>	<b>9.415.924</b>	-	-	<b>49.454.443</b>		
<b>013.10.BB</b>	<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	-	<b>4.046.189</b>	-	-	-	<b>4.046.189</b>		
<b>1611</b>	<b>Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional</b>	-	<b>2.168.390</b>	-	-	-	<b>2.168.390</b>		
1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	2.168.390	-	-	-	2.168.390	01 . 99	
01	RM	-	2.168.390	-	-	-	2.168.390	139	
<b>1613</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional</b>	-	<b>1.877.799</b>	-	-	-	<b>1.877.799</b>		
1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.877.799	-	-	-	1.877.799	01 . 99	
01	RM	-	1.877.799	-	-	-	1.877.799	139	
<b>013.10.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	-	<b>5.022.643</b>	<b>50.000</b>	-	-	<b>5.072.643</b>		
<b>1610</b>	<b>Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional</b>	-	<b>1.852.291</b>	<b>50.000</b>	-	-	<b>1.902.291</b>		
1610.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.550.134	-	-	-	1.550.134	01 . 99	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.550.134	-	-	-	1.550.134	139	
1610.BMA	Data dan Informasi Publik (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	302.157	50.000	-	-	352.157	01 . 99	
01 RM		-	302.157	50.000	-	-	352.157	139	
<b>1612</b>	<b>Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum</b>	-	<b>3.170.352</b>	-	-	-	<b>3.170.352</b>		
1612.ADE	Akreditasi Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.121.860	-	-	-	1.121.860	01 . 99	
01 RM		-	1.121.860	-	-	-	1.121.860	139	
1612.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	519.726	-	-	-	519.726	01 . 99	
01 RM		-	519.726	-	-	-	519.726	139	
1612.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.328.743	-	-	-	1.328.743	01 . 99	
01 RM		-	1.328.743	-	-	-	1.328.743	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	200.023	-	-	-	200.023	01 . 99	
01	RM	-	200.023	-	-	-	200.023	139	
<b>013.10.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>16.822.442</b>	<b>14.147.245</b>	<b>9.365.924</b>	-	-	<b>40.335.611</b>		
<b>1614</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN</b>	<b>16.822.442</b>	<b>14.147.245</b>	<b>9.365.924</b>	-	-	<b>40.335.611</b>		
1614.EAA	Layanan Perkantoran (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	16.822.442	10.311.268	-	-	-	27.133.710	01 . 99	
01	RM	16.822.442	10.311.268	-	-	-	27.133.710	139	
1614.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	572.725	-	-	-	572.725	01 . 99	
01	RM	-	572.725	-	-	-	572.725	139	
1614.EAC	Layanan Umum (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	328.600	-	-	-	328.600	01 . 99	
01	RM	-	328.600	-	-	-	328.600	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1614.EAD	Layanan Sarana Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	3.553.924	-	-	3.553.924	01 . 99	
01	RM	-	-	3.553.924	-	-	3.553.924	139	
1614.EAE	Layanan Prasarana Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	5.812.000	-	-	5.812.000	01 . 99	
01	RM	-	-	5.812.000	-	-	5.812.000	139	
1614.EAF	Layanan SDM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	416.124	-	-	-	416.124	01 . 99	
01	RM	-	416.124	-	-	-	416.124	139	
1614.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	841.349	-	-	-	841.349	01 . 99	
01	RM	-	841.349	-	-	-	841.349	139	
1614.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.293.255	-	-	-	1.293.255	01 . 99	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.293.255	-	-	-	1.293.255	139	
1614.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	281.548	-	-	-	281.548	01 . 99	
01 RM		-	281.548	-	-	-	281.548	139	
1614.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	102.376	-	-	-	102.376	01 . 99	
01 RM		-	102.376	-	-	-	102.376	139	
<b>JUMLAH</b>		<b>16.822.442</b>	<b>23.216.077</b>	<b>9.415.924</b>	-	-	<b>49.454.443</b>		

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409288	<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	1.676.909	4.120.361	5.426.178	4.285.418	4.500.103	4.626.920	3.693.302	6.956.160	6.083.610	2.906.455	2.558.109	2.620.917	49.454.443
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.114.474	1.254.497	1.255.468	1.190.903	2.103.725	2.057.304	1.426.377	1.422.019	1.395.660	1.230.083	1.177.076	1.194.856	16.822.442
		<b>BELANJA BARANG</b>	562.333	2.865.426	2.712.208	2.368.236	1.873.391	1.935.076	2.259.643	2.130.290	2.033.093	1.673.802	1.378.049	1.424.530	23.216.077
		<b>BELANJA MODAL</b>	102	438	1.458.502	726.279	522.987	634.540	7.282	3.403.852	2.654.858	2.570	2.984	1.531	9.415.924
013.10.BB.1611		Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	0	49.849	279.499	380.546	212.844	171.984	179.378	250.551	335.132	63.175	146.982	98.450	2.168.390
013.10.BB.1613		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	0	49.849	279.499	380.546	212.844	171.984	179.378	250.551	335.132	63.175	146.982	98.450	2.168.390
013.10.BF.1610		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	26.136	91.438	245.223	194.537	116.525	274.670	243.397	87.163	212.029	235.645	92.809	58.226	1.877.799
013.10.BF.1612		52 BELANJA BARANG DAN BARANG 53 BELANJA MODAL Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	26.136	91.438	245.223	194.537	116.525	274.670	243.397	87.163	212.029	235.645	92.809	58.226	1.877.799
013.10.WA.1614		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	5.737	67.750	227.985	169.098	419.097	242.178	208.541	146.651	101.381	101.501	177.933	34.438	1.902.291
			5.635	67.312	226.940	166.126	403.109	230.798	201.259	145.300	99.023	98.932	174.949	32.907	1.852.291
			102	438	1.045	2.972	15.987	11.380	7.282	1.352	2.358	2.570	2.984	1.531	50.000
			146.358	442.767	961.447	210.928	120.303	144.913	266.914	240.445	173.589	214.677	131.331	116.681	3.170.352
			146.358	442.767	961.447	210.928	120.303	144.913	266.914	240.445	173.589	214.677	131.331	116.681	3.170.352
			1.498.678	3.468.557	3.712.024	3.330.309	3.631.335	3.793.175	2.795.071	6.231.350	5.261.479	2.291.457	2.009.053	2.313.122	40.335.611

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

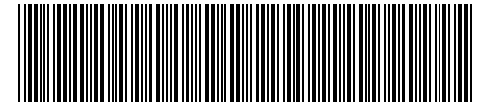
Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		51 BELANJA PEGAWAI	1.114.474	1.254.497	1.255.468	1.190.903	2.103.725	2.057.304	1.426.377	1.422.019	1.395.660	1.230.083	1.177.076	1.194.856	16.822.442
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	384.204	2.214.060	999.099	1.416.099	1.020.610	1.112.711	1.368.694	1.406.831	1.213.319	1.061.374	831.977	1.118.266	14.147.245
		53 BELANJA MODAL	0	0	1.457.457	723.307	507.000	623.160	0	3.402.500	2.652.500	0	0	0	9.365.924
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		- PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021  
IV B. C A T A T A N**



DS:7638-6900-0885-5161

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
409288	<b>BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL</b>		
013.10.WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
1614	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN</b>		
1614.EAD	<b>Layanan Sarana Internal</b>		
		Rp.	723.307
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 1 Unit dan Roda 2 sebanyak 8 Unit	Rp.	723.307
1614.EAE	<b>Layanan Prasarana Internal</b>		
		Rp.	5.812.000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Renovasi Gedung Bangunan seluas 1800 M2	Rp.	5.812.000

Jakarta, 23 November 2020  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 196204101987031003